



LURAH NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Ngoro-oro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO
dan
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN
TANAH KALURAHAN NGORO-ORO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Desa, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Pamong Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunungkidul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Ngoro-oro.
15. Pamong Kalurahan adalah Carik, Kepala-Kepala Urusan, Pelaksana-Pelaksana Teknis, dan Dukung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu Pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi :

- a. perlindungan; dan
- b. penggunaan.

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III

PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*, dan
- d. tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Kalurahan;
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Tanah Kas Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
 - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk
Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan;
atau

- c. oleh kelompok Masyarakat Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan atau kelompok Masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Lurah bersama Bamuskal melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah bersama Bamuskal menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah bersama Bamuskal memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 - f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama Bamuskal, diikuti dengan menetapkan:
 1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;

- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Desa untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Kalurahan;
- i. Lurah menetapkan:
 - 1. nama penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas Desa yang digarap; dan
 - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik kalurahan;
- b. perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat Kalurahan.

Paragraf 4
Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Desa dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;
 - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama pedukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diberikan izin;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;

3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
- d. sket lokasi Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Desa yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan

2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Desa tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama Bamuskal membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Desa; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Desa yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan Bamuskal dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa.

- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Lurah dan/atau Bamuskal menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa serta Lurah dan/atau Bamuskal menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah menerbitkan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Desa dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari Panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah kalurahan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. lurah;
 - b. carik;
 - c. pelaksana teknis;
 - d. kepala urusan;
 - e. dukuh; dan
 - f. staf pamong yang diangkat sebelum tahun 2016
- (2) Penggunaan Tanah kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 25

Penggunaan tanah kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:

- a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 5% (Lima perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah kalurahan.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

Bagian Keempat *Pengarem-arem*

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. lurah;
 - b. carik;
 - c. pelaksana teknis;
 - d. kepala urusan;
 - e. dukuh; dan
 - f. staf pamong yang diangkat sebelum tahun 2016, yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

Bagian Kelima
Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 35

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah kalurahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar kalurahan, lapangan, jalan kalurahan dan makam.

Pasal 36

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 37

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 39

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 40

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada Bamuskal;
- f. Bamuskal menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. dalam hal Bamuskal memberikan persetujuan, Lurah menetapkan Peraturan Lurah mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal Bamuskal menolak, Lurah menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 41

Besaran keringanan biaya sewa tanah kalurahan paling tinggi sejumlah 50% (Lima Puluh Lima perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 30 Nopember 2023

LURAH NGORO-ORO

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 30 Nopember 2023
CARIK NGORO-ORO,

ttd

DALYUNI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|---------------|-------|---------|------|---------------|-------|-------|------|--------------|------|------------------|------|--|
| 69 | Gunungasem | | | | | 245/Klas V | 700 | Sawah | C428 | | | | | | | | | |
| 70 | Gunungasem | | | | | 245/Klas IV | 6,110 | Sawah | C421 | | | | | | | | | |
| 71 | Sepat | | | | | 245b/Klas V | 700 | Sawah | C421 | | | | | | | | | |
| 72 | Sepat | | | | | 254/Klas V | 400 | Sawah | C421 | | | | | | | | | |
| 73 | Gunungasem | | | | | 245/ Klas III | 2,750 | Sawah | C426 | | | | | | | | | |
| 74 | Gunungasem | | | | | 245s/Klas V | 900 | Sawah | C426 | | | | | | | | | |
| 75 | Sepat | | | | | 254/Klas V | 1,400 | Sawah | C426 | | | | | | | | | |
| 76 | Gunungasem | | | | | 245b/Klas IV | 3,760 | Sawah | C422 | | | | | | | | | |
| 77 | Gunungasem | | | | | 254/Klas V | 1,400 | Sawah | C422 | | | | | | | | | |
| 78 | Jatikuning | | | | | 40/Klas III | 3,720 | Sawah | C425 | | | | | | | | | |
| 79 | Sepat | | | | | 254/Klas V | 2,670 | Sawah | C425 | | | | | | | | | |
| 80 | Sepat | | | | | 255/Klas III | 2,500 | Tegalan | C425 | | | | | | | | | |
| 81 | Sepat | | | | | 253/Klas IV | 4,200 | Sawah | C428 | | | | | | | | | |
| 82 | Sepat | | | | | | | | | 254/Klas V | 900 | Sawah | C428 | | | | | |
| 83 | Tawang | | | | | | | | | 245/Klas IV | 1,500 | Sawah | C429 | | | | | |
| 84 | Salaran | | | | | | | | | 245c/klas V | 700 | Sawah | C426 | | | | | |
| 85 | Gunungasem | | | | | | | | | 245a/Klas III | 1,100 | Sawah | C427 | | | | | |
| 86 | Gembyong | | | | | | | | | 341b/Klas V | 1,500 | Sawah | C423 | | | | | |
| 87 | Sepat/Tawang | | | | | | | | | | | | | 254/194/Klas | 1774 | Jalan Usaha Tani | C424 | |
| 88 | Tawang | | | | | | | | | | | | | 194/Klas IV | 4095 | Pasar desa | C240 | |
| 89 | Gembyong | | | | | | | | | | | | | 340/Klas III | 1524 | Makam Gembyong | C423 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|-----------------------|------|--------|
| 90 | Klegung | | | | | | | | | | | | | 270/Klas II | 300 | Makam Klegung | C424 | |
| 91 | Salaran | | | | | | | | | | | | | 257/Klas III | 5905 | Lapangan Ngoro-oro | C424 | |
| | JUMLAH | | 46,642 | | | | 131,879 | | | | | | | | 5,700 | | | 13,598 |

Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 30 Nopember 2023

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

Lurah,

1. SUMARDI Ketua 1. ttd
2. JUMIRAH Wakil Ketua 2. ttd
3. JUWATI, S.Pd Sekretaris 3. ttd
4. SUBANDI Anggota 4. ttd
5. WAGIYO Anggota 5. ttd
6. RUSIYEM, A.Md Anggota 6. ttd
7. SUMARDI Anggota 7. ttd
8. SURADI Anggota 8. ttd
9. ARIS ISTIYAWAN Anggota 9. ttd

SUKASTO

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN NGORO-ORO

TANAH KAS DESA

| NO. | LETAK OBJEK TANAH | TANAH KAS DESA | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | Persil / Klas | Luas (m ²) | Kondisi Fisik | Tanda Bukti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sepat | 245/Klas III | 2000 | Sawah | C116 | |
| 2 | Sepat | 245/Klas III | 2500 | Sawah | C425 | |
| 3 | Tawang | 194/Klas III | 2400 | Sawah | C418 | |
| 4 | Gunungasem | 254/Klas V | 1000 | Sawah | C421 | |
| 5 | Gunungasem | 254/Klas IV | 1350 | Sawah | C421 | |
| 6 | Gunungasem | 245/Klas III | 2040 | Sawah | C422 | |
| 7 | Klegung | 269/Klas III | 2600 | Sawah | C424 | |
| 8 | Klegung | 270/Klas III | 650 | Sawah | C424 | |
| 9 | Gunungasem | 254/Klas V | 1400 | Sawah | C423 | |
| 10 | Gembyong | 340/Klas III | 1800 | Sawah | C423 | |
| 11 | Jatikuning | 40/Klas III | 1000 | Sawah | C425 | |
| 12 | Gunungasem | 254/Klas V | 700 | Sawah | C426 | |
| 13 | Gunungasem | 245/Klas III | 1000 | Sawah | C426 | |
| 14 | Gunungasem | 245/Klas IV | 2100 | Sawah | C428 | |
| 15 | Sepat | 253/Klas IV | 4000 | Sawah | C428 | |
| 16 | Sepat | 253/Klas IV | 900 | Sawah | C420 | |
| 17 | Gembyong | 340/Klas IV | 1800 | Sawah | C249 | |
| 18 | Tawang | 193/Klas II | 1850 | Sawah | C415 | |
| 19 | Tawang | 245/Klas IV | 1500 | Sawah | C415 | |
| 20 | Tawang | 194/Klas IV | 1580 | Sawah | C415 | |
| 21 | Salaran | 215/Klas IV | 2135 | Sawah | C1405 | Tanah Pengganti |
| 22 | Soka | 158/Klas III | 1600 | Sawah | C926 | Tanah Pengganti |
| 23 | Sepat | 315/Klas III | 475 | Sawah | C1510 | Tanah Pengganti |
| 24 | Sepat | 428/Klas V | 435 | Sawah | C1453 | Tanah Pengganti |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------|-------|---|---------------------|--|
| 25 | Salaran | 226/Klas IV | 775 | Pekarangan yang terdapat bangunan sekolah | Sertifikat no.00003 | SD N Ngoro-oro |
| 26 | Soka | 56/Klas III | 1994 | Pekarangan yang terdapat bangunan sekolah | Sertifikat no.00005 | SD N Sokasari |
| 27 | Tawang | 194/KlasIII | 1500 | Dahulu berupa sawah kemudian dijadikan lahan untuk pembangunan gedung puskesmas | C419 | Puskesmas Patuk II |
| 28 | Salaran | 59/Klas IV | 1708 | Pekarangan yang terdapat bangunan Balai Desa Ngoro-oro | sertifikat no.00006 | Balai Kalurahan dan Kantor Kalurahan Ngoro-oro |
| 29 | Tawang | 194/Klas III | 300 | Dahulu Sawah kemudian didirikan balai padukuhan Tawang | C419 | (tidak ada sewa menyewa) |
| 30 | Tawang | 192/klas II | 1300 | Kuliner Bendo | C415 | |
| 31 | Tawang | 194/Klas | 250 | Masjid Tawang | C424 | (tidak ada sewa menyewa) |
| | JUMLAH | | 46642 | | | |

Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 30 Nopember 2023

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------|--------|
| 1. SUMARDI | Ketua | 1. ttd | |
| 2. JUMIRAH | Wakil Ketua | | 2. ttd |
| 3. JUWATI, S.Pd | Sekretaris | 3. ttd | |
| 4. SUBANDI | Anggota | | 4. ttd |
| 5. WAGIYO | Anggota | 5. ttd | |
| 6. RUSIYEM, A.Md | Anggota | | 6. ttd |
| 7. SUMARDI | Anggota | 7. ttd | |
| 8. SURADI | Anggota | | 8. ttd |
| 9. ARIS ISTIYAWAN | Anggota | 9. ttd | |

Lurah,

ttd

SUKASTO

LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN NGORO-ORO

PELUNGGUH

| NO. | JABATAN | Letak Objek Tanah | Persil / Klas | Luas (m ²) | Kondisi Fisik | Tanda Bukti | Masa Dalam Jabatan | | KETERANGAN |
|-----|----------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | Terhitung Mulai Tanggal | Berakhir Pada Tanggal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lurah | Tawang | 194/Klas II | 4,319 | Sawah | C415 | 28/11/2018 | 28/11/2024 | |
| 2 | Lurah | Tawang | 194/Klas IV | 7,660 | Sawah | C415 | 28/11/2018 | 28/11/2024 | |
| 3 | Lurah | Tawang | 192/Klas II | 1,300 | Sawah | C415 | 28/11/2018 | 28/11/2024 | |
| 4 | Lurah | Tawang | 245/Klas V | 700 | Sawah | C415 | 28/11/2018 | 28/11/2024 | |
| 5 | Carik | Sepat | 145/Klas III | 3,670 | Sawah | C416 | 19/7/2016 | 6/24/2034 | |
| 6 | Carik | Sepat | 245/Klas IV | 8,200 | Sawah | C416 | 19/7/2016 | 6/24/2034 | |
| 7 | Ulu-ulu | Sepat | 245/Klas III | 6,300 | Sawah | C417 | 15/3/2003 | 3/26/2024 | |
| 8 | Ulu-ulu | Sepat | 245/ Klas IV | 1,500 | Sawah | C417 | 15/3/2003 | 3/26/2024 | |
| 9 | Jagabaya | Tawang | 194/Klas III | 5,360 | Sawah | C418 | 15/3/2003 | 3/10/2029 | |
| 10 | Jagabaya | Gunungasem | 245/Klas III | 4,820 | Sawah | C418 | 15/3/2003 | 3/10/2029 | |
| 11 | Jagabaya | Gunungasem | 245/Klas V | 980 | Sawah | C418 | 15/3/2003 | 3/10/2029 | |
| 12 | Danarta | Tawang | 194/Klas III | 2,829 | Sawah | C419 | 24/3/1990 | 12/16/2025 | |
| 13 | Danarta | Tawang | 194/Klas IV | 1,185 | Sawah | C419 | 24/3/1990 | 12/16/2025 | |
| 14 | Danarta | Sepat | 253/Klas V | 950 | Sawah | C419 | 24/3/1990 | 12/16/2025 | |
| 15 | Danarta | Sepat | 245/Klas V | 440 | Sawah | C419 | 24/3/1990 | 12/16/2025 | |
| 16 | Danarta | Sepat | 245/Klas IV | 1,500 | Sawah | C419 | 24/3/1990 | 12/16/2025 | |
| 17 | Kamituwa | Tawang | 194/Klas III | 6,700 | Sawah | C420 | 24/11/1994 | 7/15/2025 | |
| 18 | Kamituwa | Tawang | 194/Klas IV | 6,248 | Sawah | C420 | 24/11/1994 | 7/15/2025 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------|---------------|-------|---------|-----------|------------|------------|--|
| 19 | Kamituwa | Gunungasem | 235/Klas V | 815 | Sawah | C1299 | 1/1/2023 | 7/15/2025 | |
| 20 | Tatalaksana | Gunungasem | 245b/Klas IV | 1,500 | Sawah | C415 | 9/11/2017 | 3/17/2050 | |
| 21 | Tatalaksana | Sepat | 245/Klas V | 1,000 | Sawah | C429 | 9/11/2017 | 3/17/2050 | |
| 22 | Kaur.Perencanaan | Sepat | 245/Klas IV | 2,000 | Sawah | C416/C417 | 14/6/2005 | 4/15/2030 | |
| 23 | Dukuh Tawang | Gunungasem | 254/Klas IV | 3,914 | Sawah | C427 | 14/6/2005 | 1/12/2031 | |
| 24 | Dukuh Tawang | Sepat | 254/Klas V | 1,400 | Sawah | C427 | 14/6/2005 | 1/12/2031 | |
| 25 | Dukuh Sepat | Gembyong | 340/Klas III | 4,600 | Sawah | C429 | 14/6/2005 | 8/15/2026 | |
| 26 | Dukuh Sepat | Gembyong | 340/Klas IV | 1,800 | Sawah | C429 | 14/6/2005 | 8/15/2026 | |
| 27 | Dukuh Sepat | Sepat | 254/Klas V | 1,400 | Sawah | C429 | 14/6/2005 | 8/15/2026 | |
| 28 | Dukuh Gembyong | Gembyong | 340a/Klas III | 679 | Sawah | C423 | 6/4/2021 | 20/2/2045 | |
| 29 | Dukuh Gembyong | Sepat | 254/Klas V | 1,400 | Sawah | C423 | 6/4/2021 | 20/2/2045 | |
| 30 | Dukuh Gembyong | Gembyong | 341b/Klas V | 2,500 | Sawah | C423 | 6/4/2021 | 20/2/2045 | |
| 31 | Dukuh Klegung | Klegung | 273/Klas III | 2,200 | Sawah | C424 | 25/11/2013 | 11/15/2036 | |
| 32 | Dukuh Klegung | Klegung | 269a/Klas I | 3,300 | Tegalan | C424 | 25/11/2013 | 11/15/2036 | |
| 33 | Dukuh Klegung | Klegung | 273/Klas III | 2,350 | Sawah | C424 | 25/11/2013 | 11/15/2036 | |
| 34 | Dukuh Klegung | Sepat | 254/Klas V | 1,400 | Tegalan | C424 | 25/11/2013 | 11/15/2036 | |
| 35 | Dukuh Klegung | Klegung | 272/Klas I | 1,250 | tegalan | C424 | 25/11/2013 | 11/15/2036 | |
| 36 | Dukuh Klegung | Gembyong | 340/Klas III | 200 | Tegalan | C424 | 25/11/2013 | 11/15/2036 | |
| 37 | Dukuh Gunungasem | Gunungasem | 245/Klas IV | 2,300 | Sawah | C428 | 19/7/2016 | 12/1/2043 | |
| 38 | Dukuh Gunungasem | Gunungasem | 245/Klas V | 700 | Sawah | C428 | 19/7/2016 | 12/1/2043 | |
| 39 | Dukuh Senggotan | Gunungasem | 245/Klas IV | 6,110 | Sawah | C421 | 4/3/2013 | 24/3/2042 | |
| 40 | Dukuh Senggotan | Sepat | 245b/Klas V | 700 | Sawah | C421 | 4/3/2013 | 24/3/2042 | |
| 41 | Dukuh Senggotan | Sepat | 254/Klas V | 400 | Sawah | C421 | 4/3/2013 | 24/3/2042 | |
| 42 | Dukuh Salaran | Gunungasem | 245/ Klas III | 2,750 | Sawah | C426 | 1/7/2019 | 19/4/2042 | |
| 43 | Dukuh Salaran | Gunungasem | 245s/Klas V | 900 | Sawah | C426 | 1/7/2019 | 19/4/2042 | |
| 44 | Dukuh Salaran | Sepat | 254/KlasV | 1,400 | Sawah | C426 | 1/7/2019 | 19/4/2042 | |
| 45 | Dukuh Soka | Gunungasem | 245b/Klas IV | 3,760 | Sawah | C422 | 19/7/2016 | 7/5/2036 | |
| 46 | Dukuh Soka | Gunungasem | 254/Klas V | 1,400 | Sawah | C422 | 19/7/2016 | 7/5/2036 | |
| 47 | Dukuh Jatikuning | Jatikuning | 40/Klas III | 3,720 | Sawah | C425 | 2/17/2017 | 8/9/2025 | |
| 48 | Staf Ulu-ulu | Sepat | 254/Klas V | 2,670 | Sawah | C425 | 29/5/210 | 12/10/2047 | |
| 49 | Staf Kamituwa | Sepat | 255/Klas III | 2,500 | Tegalan | C425 | 29/5/210 | 25/5/2046 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|-------|-------------|---------|-------|------|-----------|-----------|--|
| 50 | Staf Tatalaksana | Sepat | 253/Klas IV | 4,200 | Sawah | C428 | 17/7/1990 | 21/9/2024 | |
| | JUMLAH | | | 131,879 | | | | | |

Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 30 Nopember 2023

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

Lurah,

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------|--------|
| 1. SUMARDI | Ketua | 1. ttd | |
| 2. JUMIRAH | Wakil Ketua | | 2. ttd |
| 3. JUWATI, S.Pd | Sekretaris | 3. ttd | |
| 4. SUBANDI | Anggota | | 4. ttd |
| 5. WAGIYO | Anggota | 5. ttd | |
| 6. RUSIYEM, A.Md | Anggota | | 6. ttd |
| 7. SUMARDI | Anggota | 7. ttd | |
| 8. SURADI | Anggota | | 8. ttd |
| 9. ARIS ISTIYAWAN | Anggota | 9. ttd | |

SUKASTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN NGORO-ORO

PENGAREM-AREM

| NO. | PURNA TUGAS DALAM JABATAN | Letak Objek Tanah | Persil / Klas | Luas (m ²) | Kondisi Fisik | Tanda Bukti | Penggunaan Tanah | | KETERANGAN |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | Terhitung Mulai Tanggal | Berakhir Pada Tanggal | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------|------------|---------------|-------|-------|------|-----------|--------------|----|
| 1 | Dukuh Gunungasem | Sepat | 254/Klass V | 900 | Sawah | C428 | 4/8/2016 | Seumur hidup | |
| 2 | Kaur Tata Usaha & Umum | Tawang | 245/Klas IV | 1,500 | Sawah | C429 | 2012 | Seumur hidup | |
| 3 | Dukuh Salaran | Salaran | 245c/klas V | 700 | Sawah | C426 | 6/15/2019 | 6/15/2027 | |
| 4 | Dukuh Tawang | Gunungasem | 245a/Klas III | 1,100 | Sawah | C427 | 2005 | Seumur hidup | |
| 5 | Dukuh Gembyong | Gembyong | 341b/Klas V | 1,500 | Sawah | C423 | 4/27/2020 | 4/27/2027 | |
| . | JUMLAH | | | 5,700 | | | | | |

Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 30 Nopember 2023

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

Lurah,

1. SUMARDI Ketua 1. ttd
2. JUMIRAH Wakil Ketua 2. ttd
3. JUWATI, S.Pd Sekretaris 3. ttd
4. SUBANDI Anggota 4. ttd
5. WAGIYO Anggota 5. ttd
6. RUSIYEM, A.Md Anggota 6. ttd
7. SUMARDI Anggota 7. ttd
8. SURADI Anggota 8. ttd
9. ARIS ISTIYAWAN Anggota 9. ttd

SUKASTO

LAMPIRAN V
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN NGORO-ORO

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

| NO. | LETAK OBJEK TANAH | TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | KETERANGAN |
|-----|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | Persil / Klas | Luas (m ²) | Kondisi Fisik | Tanda Bukti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sepat/Tawang | 254/194/Klas | 1774 | Jalan Usaha Tani | C424 | |
| 2. | Tawang | 194/Klas IV | 4095 | Pasar desa | C240 | |
| 3. | Gembyong | 340/Klas III | 1524 | Makam Gembyong | C423 | |
| 4. | Klegung | 270/Klas II | 300 | Makam Klegung | C424 | |
| 5. | Salaran | 257/Klas III | 5905 | Lapangan Ngoro-oro | C424 | |
| | JUMLAH | | 13598 | | | |

Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk , Kabupaten Gunungkidul, 30 Nopember 2023

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------|--------|
| 1. SUMARDI | Ketua | 1. ttd | |
| 2. JUMIRAH | Wakil Ketua | | 2. ttd |
| 3. JUWATI, S.Pd | Sekretaris | 3. ttd | |
| 4. SUBANDI | Anggota | | 4. ttd |
| 5. WAGIYO | Anggota | 5. ttd | |
| 6. RUSIYEM, A.Md | Anggota | | 6. ttd |
| 7. SUMARDI | Anggota | 7. ttd | |
| 8. SURADI | Anggota | | 8. ttd |
| 9. ARIS ISTIYAWAN | Anggota | 9. ttd | |

Lurah,

ttd

SUKASTO